

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Posyandu

1. Pengertian Posyandu

Posyandu merupakan salah satu pelayanan kesehatan di desa untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui atau memeriksakan kesehatan terutama untuk ibu hamil dan anak balita. Keaktifan keluarga dan setiap posyandu tentu akan berpengaruh pada status gizi anak balitanya karena salah satu tujuan posyandu adalah memantau peningkatan status gizi masyarakat terutama anak balita dan ibu hamil (Adisasmito, 2007). Posyandu diasumsikan sebagai salah satu pendekatan yang tepat untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan balita serta dapat meningkatkan status gizi balita (Adisasmito, 2007).

Zulkifli (2003) dalam Posyandu dan Kader Kesehatan menjelaskan tiga definisi posyandu yaitu secara sederhana posyandu didefinisikan sebagai wujud peran serta masyarakat di dalam pembangunan, khususnya di dalam bidang kesehatan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan cara menciptakan kemampuan (upaya) untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, serta dipandang dari hirarki sistem upaya pelayanan kesehatan, posyandu adalah wadah yang menghubungkan ahli teknologi dan ahli kelola dalam hal upaya-upaya kesehatan yang profesional yang ditujukan kepada masyarakat sebagai upaya untuk menciptakan kemampuan masyarakat agar bisa hidup sehat. Kader Posyandu bertugas untuk mengajak masyarakat yang memiliki atau yang termasuk sasaran dari imunisasi untuk ke posyandu dan memberikan penyuluhan mengenai imunisasi sedangkan mengenai pemberian imunisasi dilakukan oleh

petugas kesehatan. Pemantauan imunisasi harus dilakukan oleh semua petugas baik pimpinan program, supervisor dan petugas vaksinasi (Notoatmodjo 2003).

2. Tujuan Posyandu

Tujuan penyelenggaraan posyandu adalah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan bayi, balita, ibu. Posyandu direncanakan dan dikembangkan oleh kader bersama Kepala Desa dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) serta penyelenggaraannya dilakukan oleh kader yang terlatih dibidang KB-Kes, berasal dari PKK, tokoh masyarakat, pemuda dengan bimbingan tim pembina LKMD tingkat kecamatan. Kader adalah anggota masyarakat yang dipilih dari dan oleh masyarakat setempat yang disetujui oleh LKMD dengan syarat; mau dan mampu bekerja secara sukarela, dapat membaca dan menulis huruf latin dan mempunyai cukup waktu untuk bekerja bagi masyarakat. Posyandu dapat melayani semua anggota masyarakat, terutama ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta Pasangan Usia Subur (PUS). Biasanya dilaksanakan satu kali sebulan ditempat yang mudah didatangi oleh masyarakat dan ditentukan masyarakat sendiri.

KMS adalah suatu pencatatan lengkap tentang kesehatan seorang anak. KMS harus dibawa ibu setiap kali ibu menimbang anaknya atau memeriksa kesehatan anak dengan demikian pada tingkat keluarga KMS merupakan laporan lengkap bagi anak yang bersangkutan, sedangkan pada lingkungan kelurahan bentuk pelaporan tersebut dikenal dengan SKDN. SKDN adalah data untuk memantau pertumbuhan balita SKDN sendiri mempunyai singkatan yaitu sebagai berikut:

S= adalah jumlah balita yang ada diwilayah posyandu,

K =jumlah balita yang terdaftar dan yang memiliki KMS,

D= jumlah balita yang datang ditimbang bulan ini,

N= jumlah balita yang naik berat badanya.

Pemantauan status gizi dilakukan dengan memanfaatkan data hasil penimbangan bulanan posyandu yang didasarkan pada indikator SKDN tersebut. Indikator yang dipakai adalah N/D (jumlah anak yang berat badannya naik dibandingkan dengan jumlah anak yang ditimbang dalam %). Peramalan dilakukan dengan mengamati kecenderungan N/D dan D/S setiap bulan pada wilayah masing-masing wilayah. Pemantauan status gizi dilaporkan setiap bulan dengan mempergunakan format laporan yang telah ada.

Cakupan partisipasi masyarakat (D/S) adalah Jumlah Balita yang ditimbang di Posyandu dibagi dengan jumlah balita yang ada di wilayah kerja Posyandu kemudian dikali 100 %. Persentase D/S disini, menggambarkan berapa besar jumlah partisipasi masyarakat di daerah tersebut yang telah tercapai.

3. Manfaat Posyandu

Salah satu faktor yang juga terkait kurangnya pemanfaatan posyandu adalah masalah gizi balita. Permasalahan gizi buruk anak balita, kekurangan gizi, busung lapar, dan masalah kesehatan lainnya menyangkut kesehatan ibu dan anak akan mudah dihindari melalui kegiatan posyandu, sehingga posyandu sebagai layanan kesehatan yang sangat dekat pada masyarakat sangat berperan penting dalam deteksi dini masalah gizi. Deteksi dini balita gizi buruk adalah kegiatan penentuan status gizi balita melalui KMS (yaitu dari berat badan menurut umur) dan tanda-tanda klinis pada balita yang dilakukan oleh orang tua. Dengan melakukan penimbangan setiap bulan di posyandu maka status gizi dan jalur pertumbuhan anak dapat selalu terpantau, sehingga bila ditemukan kelainan dalam grafik

pertumbuhan akan segera terdeteksi dan akan mudah untuk melakukan perbaikan status gizi anak. Deteksi dini ini juga perlu diimbangi dengan penyuluhan serta pemberian makanan tambahan.

Manfaat Posyandu bagi masyarakat

1. Pertumbuhan anak balita terpantau sehingga tidak menderita gizi kurang/gizi buruk.
2. Bayi dan anak balita mendapat Kapsul Vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus.
3. Bayi memperoleh imunisasi lengkap.
4. Ibu hamil terpantau berat badannya dan memperoleh Tablet Tambah Darah serja imunisasi Tetanus Toxoid.
5. Ibu nifas memperoleh Kapsul Vitamin A dan Tablet Tambah Darah.
6. Stimulasi tumbuh kembang balita dengan fasilitas alat permainan edukatif di posyandu, dan mendeteksi dini tumbuh kembang
7. Anak belajar bersosialisasi dengan sesama balita dan orang tua.
8. Memperoleh penyuluhan kesehatan tentang kesehatan ibu dan anak.
9. Apabila terdapat kelainan pada anak balita, ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui akan dirujuk ke Puskesmas
10. Dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang kesehatan ibu dan anak batita.

Banyak manfaat posyandu yang bisa diperoleh ibu dan balita. Semua fasilitas tersebut disediakan secara gratis. Sudah selangkahnya masyarakat memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah tersebut. Walaupun gratis, pelayanan tersebut bukanlah sesuatu yang murah. Jika diuangkan, biaya untuk pembelian vaksin, vitamin, dan berbagai logistik posyandu tentulah sangat mahal. Hal ini dapat dibuktikan jika kita mengimunitasikan anak kita ke Lembaga Pelayanan Kesehatan Swasta, biaya 1 kali imunisasi bisa mencapai puluhan bahkan ratusan ribu rupiah.

Oleh karena itu, setiap keluarga diharapkan aktif memanfaatkan fasilitas di posyandu. Keluarga yang aktif ke posyandu adalah keluarga yang rutin membawa anaknya ke posyandu setiap bulan. Sesibuk apapun orang tua, perlu menyempatkan diri sebulan sekali ke posyandu. Jika orang tua tidak sempat ke posyandu, maka tidak ada salahnya meminta bantuan orang lain atau pengasuh untuk mengantar anak ke posyandu. Posyandu bukan hanya tempat untuk mendapatkan imunisasi saja, tetapi juga memantau pertumbuhan berat badan, deteksi dini penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan anak, serta melakukan stimulasi tumbuh kembang balita melalui alat permainan edukatif yang tersedia di posyandu.

B. Partisipasi Ibu Menimbang Balita

1. Pengertian Partisipasi

Banyak pengertian partisipasi telah dikemukakan oleh para ahli, namun pada hakekatnya memiliki makna yang sama. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris *participate* yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian (Wijaya, 2004). Pengertian yang sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Djalal dan Supriadi (2001) dalam Yogiswara (2011), dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan

menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan, dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenai masalah sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Tilaar (2009) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana di upayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja ke dalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggung jawab atas kelompok itu. Partisipasi menurut Huneryear dan Heoman dalam Siti Irene Astuti D. (2009) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka. Pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001), di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. H.A.R Tilaar (2009) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan

demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah(bottom-up)dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Berdasarkan Pengertian di atas, bahwa konsep partisipasi memiliki makna yang luas dan beragam. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran,jasa,ataupun bentuk dalam materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis.

2. Faktor-faktor meningkatkan partisipasi masyarakat

Faktor-faktor meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan melalui penyelenggaraan forum KIM (forum komunikasi) dan pelatihan/pendekatan edukatif, penting ditekankan bahwa para pembina peran serta masyarakat harus bersikap sebagai fasilitator, pemberi bantuan teknis, bukan sebagai instruktur terhadap masyarakat, agar mampu mengembangkan kemandirian masyarakat dan bukan menimbulkan ketergantungan masyarakat.

Setiap pemimpin yang berusaha menerapkan peran serta atau partisipasi akan mengalami, bahwa jenjangnya itu bisa bergerak dari yang terendah sampai dengan yang tidak terbatas. Dalam kaitan itu, maka partisipasi yang paling rendahlah yang tentunya paling mudah di capai.

Untuk menumbuhkan kegiatan partisipasi masyarakat diperlukan suatu keterampilan dan pengetahuan agar dapat mencapai berbagai tingkatannya, dan untuk itu selalu dapat ditemukan titik tolak atau untuk mengawalinya

Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsungwarga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proseske pemerintahan.Gaventa dan Valdermadalam Siti Irene Astuti D. (2009) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi :

- a. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika iamemberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi, tetap melekatpada setiap individu yang bersangkutan
- b. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguansejauh mana orang yang dipilih dapat merepresentasikan kehendak masyarakat
- c. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.

- d. Partisipasi dilakukan secara sistematis, bukan hal yang insidental.
- e. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (good governance).

Macam-macam tingkat partisipasi masyarakat tersebut memberikan warna pula pada tingkat keikutsertaan individu/kelompok. Pada tingkat partisipasi masyarakat karena perintah atau karena paksaan, jelas keikutsertaannya bertanggung jawab adalah pasif, dan sangat tinggi pada tingkat partisipasi karena kesadaran.

Umumnya orang berpendapat bahwa partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan sifat gotong royong masyarakat yang sudah membudaya. Karena, berdasarkan kelompok ini, kalau petugas kesehatan gagal mengembangkan partisipasi masyarakat, maka hal ini dianggap kelemahan provider. Mereka berpendapat bahwa kalau para petugas kesehatan mempunyai kesungguhan hati dan mempunyai keterampilan tentang cara-cara mengembangkan dan membina keterampilan tentang cara-cara mengembangkan dan membina partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat sangat mudah di gerakkan.

Tetapi kenyataannya, tidak semudah dan sesederhana seperti yang diperkirakan. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang kompleks dan sering sulit di perhitungkan karena terlalu banyak faktor yang mempengaruhinya. Dalam budaya di mana peranan bapak sangat dominan dalam proses pengambilan keputusan, maka umumnya anggota keluarga lainnya sangat dominan pengaruhnya, maka anggota masyarakat lainnya tidak berani mengambil inisiatif. Mereka lebih cenderung untuk menunggu dan menanti intruksi dari golongan atasan yang lebih berpengaruh tersebut. Karena itulah tingkat

partisipasinya adalah partisipasi karena pereintah. Seperti telah kita kemukakan dibagian terdahulu, bahwa pembangunan adalah suatu proses pembaharuan, termasuk pembaharuan pola pikir dan sikap mental, bukan sekedar pembaharuan fisik semata-mata.